

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)

Nota Dinas

Nomor : 4503/Ses.1/02/2024

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Januari Tahun 2024
Tanggal : 16 Februari 2024

Sehubungan dengan telah memasuki tahun anggaran 2024 dan telah berakhirnya periode bulan Januari 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan Januari 2024 penyerapan LKPP berdasarkan aplikasi MonSAKTI adalah sebesar Rp3.338.605.898 (1,36%).
2. Dari pagu anggaran tersebut, pagu pengadaan LKPP sebesar Rp190.987.837.000 (102,05%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 31 Januari 2024, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp122.327.764.000 atau sebesar 64,05%. Masih terdapat Rp68.660.073.000 (38%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
3. Sampai dengan Januari 2024, LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas dan aplikasi SMART Kemenkeu dikarenakan aplikasi tersebut belum dapat diakses dan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.
4. Unit Organisasi belum dapat melaporkan capaian kinerja periode Januari 2024 melalui aplikasi SiREMOM, dan efektif baru dapat melaporkan pada periode pelaporan bulan Februari 2024 disebabkan dikarenakan:
 - a. Sistem pelaporan (SiREMOM) masih dalam pengelolaan atau *setting data* informasi kinerja untuk disesuaikan dengan target kinerja 2024 dan
 - b. Terdapat perubahan PiC Pelaporan untuk TA 2024.
5. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk meningkatkan kinerja dan anggaran LKPP diharapkan setiap Unit Organisasi agar:
 - a. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan memperhatikan target penyerapan triwulanan sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Utama Nomor 2723/SES/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan menyampaikan RPD tersebut kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Melaksanakan rencana aktivitas dan penyerapan anggaran sesuai dokumen KAK dan RAB dengan memperhatikan RPD masing-masing;
 - c. Menyusun langkah-langkah dalam rangka pencapaian target kinerja unit organisasi dengan memperhatikan pencapaian dan evaluasi kinerja padatahun sebelumnya;
 - d. Memonitor pelaksanaan dan penyerapan anggaran terhadap aktivitas yang telah direncanakan;
 - e. Memastikan seluruh belanja pengadaan barang/jasa telah diinput pada SIRUP sesuai dengan pagu anggaran unit organisasi masing-masing;
 - f. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan paket pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan dan direncanakan proses pemilihan pada bulan Januari 2024 dapat segera diproses dalam triwulan I;
 - g. Mengoptimalkan awal tahun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun;
 - h. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran; serta
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta anggaran secara berkala di unit



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

organisasi masing-masing.

6. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Kementerian PAN-RB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan aplikasi SiREMON dalam pemberian feedback atas rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Iwan Herniwan

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

LAPORAN

Monitoring & Evaluasi Kinerja Unit Organisasi

Periode Bulan Januari

TAHUN
20
24

Biro Perencanaan dan Keuangan

Gedung LKPP Lt.9
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

SUMMARY

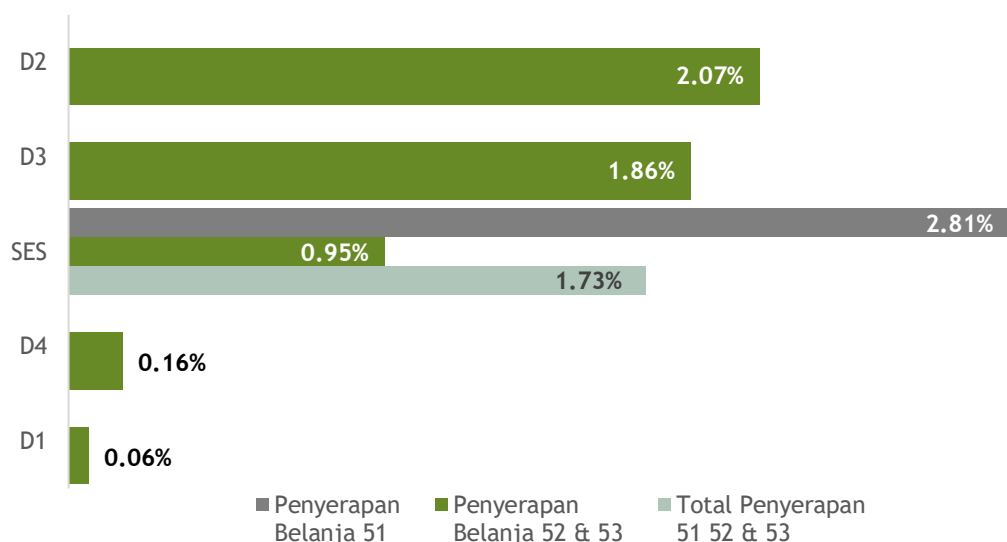
PENYERAPAN ANGGARAN



Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI
Per tanggal 31 Januari 2024



Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Organisasi Eselon I TA 2024
berdasarkan aplikasi MonSAKTI

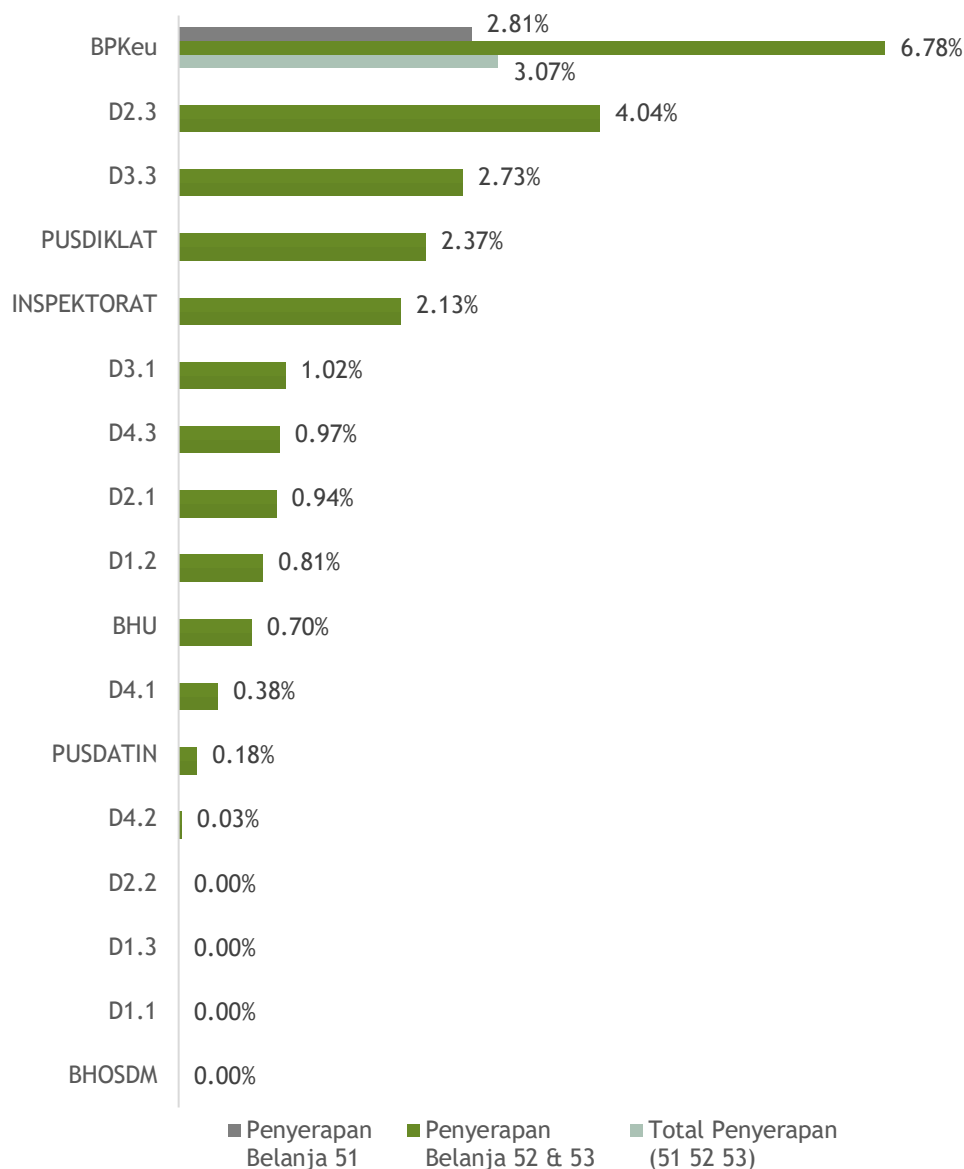


*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 31 Januari 2024

Sampai dengan 31 Januari 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital (2.07% - Rp783.613.000) dan terkecil terdapat pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (0.06% - Rp18.800.000).



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



Sampai dengan 31 Januari 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon II, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Biro Perencanaan dan Keuangan (6,78% - Rp249,670,500) dan terkecil terdapat pada D2.2, D1.3, D1.1 dan BHOSDM (0%).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA	6
1.1 Anggaran	6
A. Pagu Anggaran	6
B. Penyerapan Anggaran	7
1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA	8
1.3 PELAPORAN EKSTERNAL	9
A. Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) smart Kementerian Keuangan	9
B. Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas.....	10
BAB II MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI	12
2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)	12
A. Capaian Kinerja Fisik.....	12
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	12
2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)	13
A. Capaian Kinerja Fisik.....	13
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	14
2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)	14
A. Capaian Kinerja Fisik.....	14
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	15
2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)	16
A. Capaian Kinerja Fisik.....	16
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	16
2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)	17
A. Capaian Kinerja Fisik.....	17
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	17
2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)	18
A. Capaian Kinerja Fisik.....	18
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	19
2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)	19
A. Capaian Kinerja Fisik.....	19
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	20

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)	21
A. Capaian Kinerja Fisik	21
B. Capaian Kinerja Anggaran	21
2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)	22
A. Capaian Kinerja Fisik	22
B. Capaian Kinerja Anggaran	23
2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)	23
A. Capaian Kinerja Fisik	23
B. Capaian Kinerja Anggaran	24
2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)	24
A. Capaian Kinerja Fisik	24
B. Capaian Kinerja Anggaran	25
2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)	25
A. Capaian Kinerja Fisik	25
B. Capaian Kinerja Anggaran	26
2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)	27
A. Capaian Kinerja Fisik	27
B. Capaian Kinerja Anggaran	28
2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)	28
A. Capaian Kinerja Fisik	28
B. Capaian Kinerja Anggaran	29
2.15 INSPEKTORAT	29
A. Capaian Kinerja Fisik	29
B. Capaian Kinerja Anggaran	30
2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	30
A. Capaian Kinerja Fisik	30
B. Capaian Kinerja Anggaran	31
2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)	32
A. Capaian Kinerja Fisik	32
B. Capaian Kinerja Anggaran	32
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	34
A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	34

BAB I

MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 Anggaran

A. Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor: SP DIPA-DIPA-106.01-0/2024 tanggal 24 November 2024, pagu anggaran LKPP Tahun 2024 sebesar Rp244.786.416.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	21,98%
52 Belanja Barang	169.724.173.000	69,34%
53 Belanja Modal	21.263.664.000	8,687%
TOTAL	244.786.416.000	100%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	53.798.579.000	55.515.411.000	19.411.512.000	74.926.923.000
BHOSDM	-	5.956.861.000	-	5.956.861.000
BPKeu	-	3.683.337.000	-	3.683.337.000
BHU	-	45.875.213.000	19.411.512.000	65.286.725.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	53.798.579.000	-	-	53.798.579.000
Kedeputian 1 (D1)	-	31.625.133.000	-	31.625.133.000
D1.1	-	18.754.375.000	-	18.754.375.000
D1.2	-	2.318.730.000	-	2.318.730.000
D1.3	-	10.552.028.000	-	10.552.028.000
Kedeputian 2 (D2)	-	37.933.299.000	-	37.933.299.000
D2.1	-	4.831.489.000	-	4.831.489.000
D2.2	-	14.831.835.000	-	14.831.835.000
D2.3	-	18.269.975.000	-	18.269.975.000
Kedeputian 3 (D3)	-	7.789.260.000	-	7.789.260.000
D3.1	-	3.969.791.000	-	3.969.791.000
D3.3	-	3.819.469.000	-	3.819.469.000
Kedeputian 4 (D4)	-	23.994.341.000	-	23.994.341.000
D4.1	-	3.229.245.000	-	3.229.245.000
D4.2	-	18.663.984.000	-	18.663.984.000
D4.3	-	2.101.112.000	-	2.101.112.000
INSPEKTORAT	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
PUSLAT	-	3.444.686.000	467.208.000	3.911.894.000

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
PUSDATIN	-	8.422.043.000	1.384.944.000	9.806.987.000
TOTAL	53.798.579.000	169.724.173.000	21.263.664.000	244.786.416.000

B. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 7 Februari 2024 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar **Rp3.338.605.898** atau sebesar **1,36%**. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	1.512.695.586	2,81%	52.285.883.414
52 Belanja Barang	169.724.173.000	1.825.910.312	1,08%	167.898.262.688
53 Belanja Modal	21.263.664.000	0	0,00%	21.263.664.000
Total	244.786.416.000	3.338.605.898	1,36%	241.447.810.102

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
SES (Gaji)	53.798.579.000	1.512.695.586	2,81%	52.285.883.414
PUSLAT	3.911.894.000	92.780.000	2,37%	3.819.114.000
INSPEKTORAT	1.000.000.000	21.340.000	2,13%	978.660.000
D2	37.933.299.000	783.613.000	2,07%	37.149.686.000
D3	7.789.260.000	144.908.452	1,86%	7.644.351.548
SES	74.926.923.000	708.242.860	0,95%	74.218.680.140
PUSDATIN	9.806.987.000	17.568.000	0,18%	9.789.419.000
D4	23.994.341.000	38.658.000	0,16%	23.955.683.000
D1	31.625.133.000	18.800.000	0,06%	31.606.333.000
TOTAL	244.786.416.000	3.338.605.898	1,36%	241.447.810.102

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BPKeu	3.683.337.000	249.670.500	6,78%	3.433.666.500
D2.3	18.269.975.000	738.293.000	4,04%	17.531.682.000
BPKeu (Gaji)	53.798.579.000	1.512.695.586	2,81%	52.285.883.414
D3.3	3.819.469.000	104.250.000	2,73%	3.715.219.000
PUSLAT	3.911.894.000	92.780.000	2,37%	3.819.114.000
INSPEKTORAT	1.000.000.000	21.340.000	2,13%	978.660.000
D3.1	3.969.791.000	40.658.452	1,02%	3.929.132.548
D4.3	2.101.112.000	20.403.000	0,97%	2.080.709.000
D2.1	4.831.489.000	45.320.000	0,94%	4.786.169.000
D1.2	2.318.730.000	18.800.000	0,81%	2.299.930.000
BHU	65.286.725.000	458.572.360	0,70%	64.828.152.640
D4.1	3.229.245.000	12.233.000	0,38%	3.217.012.000
PUSDATIN	9.806.987.000	17.568.000	0,18%	9.789.419.000
D4.2	18.663.984.000	6.022.000	0,03%	18.657.962.000
BHOSDM	5.956.861.000	-	0,00%	5.956.861.000
D1.1	18.754.375.000	-	0,00%	18.754.375.000
D1.3	10.552.028.000	-	0,00%	10.552.028.000
D2.2	14.831.835.000	-	0,00%	14.831.835.000
TOTAL	244.786.416.000	3.338.605.898	1,36%	241.447.810.102

1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan revisi anggaran ke-24, pagu pengadaan LKPP adalah sebesar Rp190.987.837.000 (102,05%) dari pagu total LKPP. Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 07 Februari 2024, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp122.327.764.000 atau sebesar 64,05% yang terdiri dari:

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Jasa Lainnya	562	60.787.307.000	31,83%
Barang	361	24.746.612.000	12,96%

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Jasa Konsultansi	25	5.649.336.000	2,96%
Pekerjaan Konstruksi	2	550.000.000	0,29%
Swakelola	374	30.594.509.000	16,02%
TOTAL	1324	122.327.764.000	64,05%

Metode Pemilihan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Pengadaan Langsung	491	34.345.446.000	17,98%
e-Purchasing	263	32.739.080.000	17,14%
Tender	9	4.228.460.000	2,21%
Penunjukan Langsung	4	103.630.000	0,05%
Dikecualikan	176	16.101.999.000	8,43%
Seleksi	7	4.214.640.000	2,21%
Swakelola	374	30.594.509.000	16,02%
TOTAL	1324	122.327.764.000	64,05%

1.3 PELAPORAN EKSTERNAL

A. Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA merupakan sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.

Pada bulan Januari 2024 telah dilakukan pengisian dan assesment Rincian Output (RO) pada aplikasi SMART DJA dimana saat ini 70 RO telah dikonfirmasi oleh DJA sebagaimana terdapat pada tampilan berikut:

Assessment RO

70 RO 70 RO Approved 0 RO Processed 0 RO Rejected

Cara Pengisian Download Excel

Tampilkan 10 entri Cari:

No.	Program/Kegiatan/KRO/RO	Volume	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Status Konfirmasi		Aksi	Tanggal Update	Histori
							KL	DJA			
1	CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAC Peraturan Pemerintah 111 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (RPP)	Statis	Otomatis	Maximize	Stabilized	✓	✓	-	2024-01-30 14:15:29	🔒
2	CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa AAD Peraturan Presiden 111 Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (R Perpres)	Statis	Otomatis	Maximize	Stabilized	✓	✓	-	2024-01-30 14:15:31	🔒
3	CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 6319 Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	2,0000 (Baucapain)	Statis	Tahapan	Maximize	Stabilized	✓	✓	-	2024-01-30 14:15:31	🔒

Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada Menu Assessment RO

Sampai dengan saat ini NKA LKPP per Januari 2024 belum dapat diinformasikan dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.

B. Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Sampai dengan Januari 2024 LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja dikarenakan aplikasi e-monev BAPPENAS masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024..



Gambar 1. 2 Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 Rincian Output, dan 9 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	8.4-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	-
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Terdefinisi	-
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	-
2.	955-Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	-
3.	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	-
4.	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dari 4 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp57.481.916.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	1.512.695.586	2.81%	52.285.883.414
52 Belanja Barang	3.683.337.000	249.670.500	6.78%	3.433.666.500,
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	57.481.916.000	1.762.366.086	3.07%	55.719.549.914

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024 Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 indikator sasaran kegiatan, 5 Rincian Output, dan 12 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	8.1-Meningkatnya kualitas deregulasi kebijakan	Indeks kualitas kebijakan	Predikat: Baik	-
		Indeks reformasi hukum	Predikat: Istimewa	-
2.	8.2-Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi penerapan reformasi birokrasi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	-
		Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 75	-
3.	8.3-Meningkatnya profesionalitas SDM	Indeks profesionalitas ASN LKPP	Predikat: Sangat Tinggi	-
		Indeks sistem merit	Predikat: Sangat Baik	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	957-Layanan Hukum	1 Layanan	-
2.	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Layanan	-
3.	961-Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	-
4.	969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	-
5.	954-Layanan Manajemen SDM	510 Orang	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 11 Komponen dari 5 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran BHOSDM adalah sebesar Rp5.956.861.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.956.861.000	0	0%	5.956.861.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	5.956.861.000	0	0%	5.956.861.000

2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 indikator Sasaran Kegiatan, 8 Rincian Output, dan 18 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	8.5-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Nilai: B	-
		Indeks pelayanan publik	Predikat: Sangat Baik	-
		Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks: Informatif	-
2.	8.6-Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	-
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Istimewa	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
		Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I	Predikat: Sangat Baik	-
		Indeks kualitas pengelolaan aset	Nilai: 3,05	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5 Layanan	-
2.	956-Layanan BMN	1 Layanan	-
3.	959-Layanan Protokoler	1 Layanan	-
4.	962-Layanan Umum	1 Layanan	-
5.	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	-
6.	951-Layanan Sarana Internal	83 Unit	-
7.	971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	-
8.	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	-

3. Komponen

Pada tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum memiliki 18 Komponen dari 8 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran BHU adalah sebesar Rp65.286.725.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	45.875.213.000	458.572.360	0,7%	45.416.640.640
53 Belanja Modal	19.411.512.000	-	-	19.411.512.000
Total	65.286.725.000	458.572.360	0,7%	64.828.152.640

2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	4 Rancangan Peraturan	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	111-Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	-
2.	111-Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 R.Perpres	-
3.	111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rancangan Peraturan	-
4.	111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2 Rekomendasi Kebijakan	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, D1.1 memiliki 12 Komponen dari 4 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D1.1 adalah sebesar Rp18.754.375.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.754.375.000	-	0%	18.754.375.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
Total	18.754.375.000	-	0%	18.754.375.000

2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 3 Rincian Output, dan 9 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	3 Dokumen	-
		Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD Badan Hukum Publik dan Desa	3 Dokumen	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	125-Pedoman/Model Dokumen KSO BLUD dan Kerjasama BUMD	2 NSPK	-
2.	124-Model Dokumen PBJ Khusus	3 NSPK	-
3.	123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus	14 Lembaga	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, D1.2 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Awal LKPP TA 2024, pagu D1.2 adalah sebesar Rp2.318.730.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.318.730.000	18.800.000	0,81%	2.299.930.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.318.730.000	18.800.000	0,81%	2.299.930.000

2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 Rincian Output, dan 11 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	1.1-Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	397 Pelaku Usaha	-
2.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rekomendasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional	4 Dokumen	-
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP	2 NSPK	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	4334 UMKM	-
2.	131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	3 Kesepakatan	-

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
3.	131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 NSPK	-
4.	131-NSPK Pengadaan Barang/Jasa dalam Kerangka Kerjasama Internasional	1 NSPK	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, D1.3 memiliki 11 Komponen dari 4 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Awal LKPP TA 2024, pagu D1.3 adalah sebesar Rp10.552.028.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	10.552.028.000	-	0%	10.552.028.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	10.552.028.000	-	0%	10.552.028.000

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 10 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem informasi lainnya	2 Segmen	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya	3 Segmen	-
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan	624 K/L/Pemda	-
2.	5.2-Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	80 Persen	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	-
2.	212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	-
3.	211-Roadmap IT LKPP 2025-2029	1 Dokumen	-
4.	211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	2 Laporan	-

3. Komponen

Pada tahun 2024 D2.1 memiliki 10 Komponen dari 4 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D2.1 adalah sebesar Rp4,831,489,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	4,831,489,000	45,320,000	0.94%	4,786,169,000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	4,831,489,000	45,320,000	0.94%	4,786,169,000

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 5 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 5 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	450 LPSE	-
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya	3 Segmen	-
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing	450 K/L/Pemda	-
2.	5.3-Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal	Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE	273 LPSE	-
		Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital	100 Persen	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	231-SPSE Terpusat	450 Layanan	-
2.	234-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola	273 Unit Kerja	-

3. Komponen

Pada tahun 2024 D2.2 memiliki 5 Komponen dari 2 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D2.2 adalah sebesar Rp14,831,835,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	14,831,835,000	-	0%	14,831,835,000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	14,831,835,000	-	0%	14,831,835,000

2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	2.1-Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah	Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik	7.000.000 Produk	-
		Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik	4.500.000 Produk UMK-K	-
2.	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya	1 Segmen	-
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing	450 K/L/Pemda	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	221-Pedoman Sistem Katalog dan E-Purchasing	2 Pedoman	-

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
2.	221-Produk yang Masuk E-Catalogue	10.000.000 Produk	-
3.	221-Sistem E-Purchasing Terintegrasi	1 Sistem Informasi	-
4.	221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik	1 Laporan	-

3. Komponen

Pada tahun 2024 D2.3 memiliki 12 Komponen dari 4 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D2.3 adalah sebesar Rp18,269,975,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18,269,975,000	738,293,000	4.04%	17,531,682,000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18,269,975,000	738,293,000	4.04%	17,531,682,000

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	7600 Orang	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
		Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK	7975 Orang	-
2.	6.2-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	Persentase pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ	70 Persen	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1	311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rekomendasi Kebijakan	-
2.	311-SDM JF PPBJ	10.000.000 Produk	-
3.	311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	1 Sistem Informasi	-

3. Komponen

Pada tahun 2024 D3.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA LKPP TA 2024, pagu anggaran D3.1 adalah sebesar Rp3.969.791.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3,969,791,000	Rp40,658,452	1.02%	Rp3,929,132,548
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	Rp3,969,791,000	Rp40,658,452	1.02%	Rp3,929,132,548

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024 Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi	5.480 Orang	-
		Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi	92%	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	34 Lembaga	-
2.	331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75 Orang	-
3.	331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5.480 Orang	-
4.	331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	-
5.	332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20 NSPK	-
6.	331-Sarana Sertifikasi PBJP	196 Unit	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, D3.3 memiliki 18 Komponen dari 6 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D3.3 adalah sebesar Rp3.819.469.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024. Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.819.469.000	104.250.000	2.73%	3.715.219.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.819.469.000	104.250.000	2.73%	3.715.219.000

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024 Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	3.1- Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	68 K/L	-
		Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	60 K/L	-
2.	7.1-Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di K/L	Jumlah K/L yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	50 K/L	-
		Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	16 K/L	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	68 K/L	-
2.	412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20 K/L	-
3.	413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probitry Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi	16 K/L	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, D4.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D4.1 adalah sebesar Rp3.229.245.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
52 Belanja Barang	3.229.245.000	12.233.000	0.38%	3.217.012.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.229.245.000	12.233.000	0.38%	3.217.012.000

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	3.2-Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	530 Pemda	-
		Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	538 Pemda	-
2.	7.2-Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di Pemda	Jumlah Pemda yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	100 Pemda	-
		Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	50 Pemda	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	538 Pemda	-
2.	422- Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	100 Pemda	-
3.	423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi	50 Pemda	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, D4.2 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D4.2 adalah sebesar Rp 18.663.984.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.663.984.000	6.022.000	0.03%	18.657.962.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18.663.984.000	6.022.000	0.03%	18.657.962.000

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 13 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	7.3-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Persentase perkara/permasalahan PBJP yang terlayani	100 Persen	-
		Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS	50 /K/L/Pemda	-
		Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya	65 APIP /K/L/Pemda	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
		Jumlah Provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli yang optimal	15 Provinsi	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2 Orang	-
2.	432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	50 Orang	-
3.	431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	360 Perkara	-
4.	432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25 Perkara	-
5.	431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9 Lembaga	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, D4.3 memiliki 13 Komponen dari 5 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran D4.3 adalah sebesar Rp 2.101.112.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	2.101.112.000	20.403.000	0.97%	2.080.709.000
53 Belanja Modal			0%	
Total	2.101.112.000	20.403.000	0.97%	2.080.709.000

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024 Inspektorat memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	8.8-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	-
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	85 Persen	-
		Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal	Predikat: Sangat Memuaskan	-
		Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Predikat: Sangat Baik	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	965-Layanan Audit Internal	12 Dokumen	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.000.000.000	21.340.000	2.13%	978.660.000
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	1.000.000.000	21.340.000	2.13%	978.660.000

2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024 Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 18 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih	19.600 Orang	-
		Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih	4.250 Orang	-
		Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi	12.000 Orang	-
		Persentase peningkatan kualitas pelatihan	85 Persen	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	511-LPPBJ yang Terakreditasi	80 Lembaga	-
2.	511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	7 NSPK	-
3.	512-Pedoman Pelatihan PBJ	3 Pedoman	-
4.	511-Media Pembelajaran Berbasis TIK	5 Paket	-
5.	511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis	22.950 Orang	-
6.	512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional	1.400 Orang	-
7.	512-Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJP	2 Laporan	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, Puslat SDM PBJ memiliki 18 Komponen dari 7 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran Puslat SDM PBJ adalah sebesar Rp3.911.894.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada Puslat SDM PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.444.686.000	92.780.000	2.37%	3.351.906.000

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
53 Belanja Modal	467.208.000	-	0%	467.208.000
Total	3.911.894.000	92.780.000	2.37%	3.819.114.000

2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024 Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi
1	8.7-Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	Predikat SPBE	Predikat: Baik	-

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	-
2.	963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 Layanan	-
3.	963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 Unit	-
4.	963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Sistem Informasi	-

3. Komponen

Pada tahun 2024, Pusdatin memiliki 8 Komponen dari 4 Rincian Output.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2024, pagu anggaran Pusdatin adalah sebesar Rp9.806.987.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Januari 2024, penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	8.422.043.000	17.568.000	0.18%	8.404.475.000
53 Belanja Modal	1.384.944.000	-	-	1.384.944.000
Total	9.806.987.000	17.568.000	0.18%	9.789.419.000

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Januari 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pagu tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan Januari 2024 penyerapan LKPP adalah sebesar Rp3.338.605.898 (1,36%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
	Nominal (Rp)		%	
51 Belanja Pegawai	53.798.579.000	1.512.695.586	2,81%	52.285.883.414
52 Belanja Barang	169.724.173.000	1.825.910.312	1,08%	167.898.262.688
53 Belanja Modal	21.263.664.000	0	0,00%	21.263.664.000
Total	244.786.416.000	3.338.605.898	1,36%	241.447.810.102

2. Unit Organisasi belum dapat melaporkan capaian kinerja periode Januari 2024 melalui aplikasi SiREMON, dan efektif baru dapat melaporkan pada periode pelaporan bulan Februari 2024 disebabkan karena:
 - a. Sistem pelaporan (SiREMON) masih dalam pengelolaan atau penyesuaian data dan/atau informasi kinerja untuk disesuaikan dengan target kinerja 2024, dan
 - b. Terdapat perubahan PIC Pelaporan untuk TA 2024.
3. Sampai dengan Januari 2024, unit organisasi belum menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2024 sehingga belum terdapat informasi terkait deviasi realisasi anggaran bulan Januari 2024.
4. Pada tahun 2024, pagu pengadaan LKPP sebesar Rp190.987.837.000 (102,05%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 07 Februari 2024, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp122.327.764.000 atau sebesar 64,05%. Masih terdapat Rp68.660.073.000 (38%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
5. Sampai dengan Januari 2024, LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu karena aplikasi tersebut masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Periode Januari 2024, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Penyerapan LKPP pada bulan Januari 2024 sebesar Rp244.786.416.000 (1,36%) sebagian besar hanya dari Belanja Pegawai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas penyerapan anggaran LKPP di tahun 2024, setiap pimpinan unit organisasi agar:
 - a. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan memperhatikan target penyerapan triwulanan sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris Utama Nomor 2723/SES/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan menyampaikan RPD tersebut kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Melaksanakan rencana aktivitas dan penyerapan anggaran sesuai dokumen KAK dan RAB dengan memperhatikan RPD masing-masing;
 - c. Menyusun langkah-langkah dalam rangka pencapaian target kinerja unit organisasi dengan memperhatikan pencapaian dan evaluasi kinerja padatahun sebelumnya;
 - d. Memonitor pelaksanaan dan penyerapan anggaran terhadap aktivitas yang telah direncanakan;
 - e. Memastikan seluruh belanja pengadaan barang/jasa telah diinput pada SIRUP sesuai dengan pagu anggaran unit organisasi masing-masing;
 - f. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan paket pengadaan barang/jasa yang sudah diumumkan dan direncanakan proses pemilihan pada bulan Januari 2024 dapat segera diproses dalam triwulan I;
 - g. Mengoptimalkan awal tahun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun;
 - h. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran; serta
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta anggaran secara berkala di unit organisasi masing-masing.
2. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Kementerian PAN-RB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan aplikasi SiREMON dalam pemberian *feedback* atas rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMON secara berkala.

